

UNDERSTANDING OF HISTORY 350 YEARS INDONESIA COLONIZED BY DUTCH

Ulil Absiroh*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si, Bunari, S.Pd, M.Si*****

Email: Ulilabsiroh22@gmail.com, Isjoni@yahoo.com, Bunari1975@gmail.com

CP: 082326584677

**History Education Department
Faculty of Education and Teacher Training
University of Riau**

Abstract: *Judged nation of Indonesia colonized by Dutch for 350 years need investigations back to prove its truth. It is not only through the political approach, but also need the law approach. Through the law approach, Resink had showed the force proofs that the nation of Indonesia (firstly called by Nusantara) not all of its colonized by Dutch-Indies Government. As for being the writer purpose in this research are to be aware the arrival of Dutch to Nusantara, to be aware of Dutch political system to occupied in Nusantara, to be aware the background of understanding about 350 years Indonesia colonized by Dutch. Method that is used in this research was history and documentary. Data are obtainable through literature technique and documentation. The result from this research had showed that is not 350 years Indonesia colonized by Dutch, with proofs that are: mentioning of Indonesia's name, law of nations at Makassar in the past, kings and kingdoms that independent in Nusantara at 1850-1910's. Resink calculation, In fact, Dutch only occupied all of Nusantara for 40 until 50 years. However, the writer makes a conclusion that the reality Indonesia colonized by Dutch only for 30 years since the conquest of Aceh in 1912. So since 1912 all regions of Indonesia official colonized by Dutch until in 1942. The understanding 350 years Indonesia colonized by Dutch created by politicians of Indonesia honestly had been to positive values, the purpose to dig up nationalism and patriotism nation of Indonesia, and legitimacy association and federation from nation of Indonesia because condition of nation of Indonesia was separated, and to replaced fight spirits nation of Indonesia. However, the understanding about 350 years Indonesia colonized by Dutch had impacted for composing Indonesia history because it is not historically fact.*

Key Words: 350 Years, Indonesia, Colonized, Dutch.

SEJARAH PEMAHAMAN 350 TAHUN INDONESIA DIJAJAH BELANDA

Ulil Absiroh*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si, Bunari, S.Pd, M.Si*****

Email: Ulilabsiroh22@gmail.com, Isjoni@yahoo.com, Bunari1975@gmail.com

CP: 082326584677

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

Abstrak: Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya, tidak hanya melalui pendekatan politik akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Melalui pendekatan hukum, Resink menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Bangsa Indonesia (dulunya disebut Nusantara), tidak semuanya dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian sejarah ini adalah untuk mengetahui proses kedatangan Belanda ke Nusantara, untuk mengetahui sistem politik Belanda dalam penjajahan di Nusantara, untuk mengetahui latar belakang pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, untuk mengetahui tentang kebenaran 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau dokumenter. Data yang diperoleh melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa bukan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, dengan bukti-bukti yaitu: penyebutan nama Indonesia, hukum bangsa-bangsa di Makassar masa lalu, Raja dan Kerajaan yang merdeka di Nusantara tahun 1850-1910. Hitungan Resink, Belanda sebenarnya hanya menjajah seluruh Nusantara selama 40 sampai 50 tahun. Namun penulis mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia dijajah Belanda hanya 30 tahun sejak ditaklukannya Aceh tahun 1912. Sehingga sejak 1912 seluruh wilayah di Indonesia resmi dijajah Belanda hingga tahun 1942. Pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda yang dibuat oleh para politisi Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai positif tujuannya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia, serta legitimasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena kondisi pada waktu itu bangsa Indonesia terpecah-pecah dan mengembalikan semangat juang bangsa Indonesia. Namun meskipun demikian, pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda berdampak pada penulisan sejarah Indonesia, karena pemahaman ini bukan fakta sejarah.

Kata Kunci: 350 Tahun, Indonesia, Dijajah, Belanda

PENDAHULUAN

Sejak Turki Usmani menguasai Kota Konstantinopel serta menguasai perdagangan di Timur Tengah tahun 1453. Sehingga, bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber rempah-rempah dengan melaksanakan ekspedisi penjelajahan samudera hingga akhirnya sampai ke Nusantara. bangsa-bangsa Eropa yang sampai di Nusantara yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris. Diantara kelima bangsa tersebut, Belanda lah yang paling lama dan fenomenal berada di Nusantara sejak kedatangan Cornelis de Houtman tahun 1596 hingga sampai Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang di sebut VOC tahun 1602 sampai 1799.

Lamanya bangsa Belanda di Nusantara mengakibatkan munculnya prespektif bahwa bangsa Belanda menjajah selama 350 tahun. Prespektif tersebut sudah sangat lama tertanam pada hati sanubari masyarakat Indonesia hingga sampai saat ini. Sampai di buku-buku sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Namun, benarkah bahwa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun oleh bangsa Belanda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana terbentuknya pemahaman tentang Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan mengapa Indonesia tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian sejarah ini adalah untuk mengetahui proses kedatangan Belanda ke Nusantara, untuk mengetahui sistem politik Belanda dalam penjajahan di Nusantara, untuk mengetahui latar belakang pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, untuk mengetahui tentang kebenaran 350 tahun Indonesia dijajah Belanda.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode historis atau dokumenter, yang dapat digunakan dalam pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan sejarah pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda.

Adapun yang menjadi sasaran untuk penelitian ini adalah mitos 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Tempat penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini diberbagai tempat sesuai metode dengan metode penelitian, maka penelitian dilakukan dipergustakaan wilayah Riau Soeman HS, pustaka Universitas Riau (UR), perpustakaan Prof. Suwardi MS (STP Riau), pustaka FKIP UR, pustaka Fisip UR, dan pustaka lainnya. Waktu penelitian ini dilakukan setelah pelaksanaan ujian proposal hingga selesai dalam tempo waktu yang telah ditentukan (ujian skripsi).

Dalam menguji hipotesis yang telah diajukan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipakai penulis adalah metode sejarah yaitu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: pemilihan subyek untuk diselidiki, pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut, pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya, pemetikan unsur-unsur yang dipercaya daripada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.¹

¹ Louis Gottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah/Louis Gottschalk; penerjemah Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) Hal.34

Berdasarkan langkah-langkah diatas, maka penulis mengumpulkan data-data yang melakukan kritik intern dan ekstern terhadap data yang diperoleh. Setelah itu data tersebut dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN

Proses Kedatangan Belanda ke Nusantara

Pada abad ke-15 terjadi beberapa peristiwa penting di Eropa. Salah satu kejadian penting yang dapat mempengaruhi jalannya sejarah dunia adalah peristiwa jatuhnya Kota Konstantinopel yang merupakan Ibu Kota Romawi Timur pada tahun 1453. Kota Konstantinopel merupakan benteng terdepan Eropa untuk membendung masuknya agama Islam di Benua Eropa. Dalam suatu perang yang sengit akhirnya orang Turki Utsmani yang beragama islam berhasil merebut Kota Konstantinopel. Dengan demikian terbukalah pintu bagi penguasa islam untuk masuk ke Eropa. Tetapi bagi Eropa jatuhnya Kota Konstantinopel berarti putusnya hubungan antara dunia Barat dan dunia Timur. Jalan dagang menuju ke dunia Timur juga terputus. Untuk itu orang Eropa harus mencari jalan lain untuk menuju dunia Timur.²

Akhinya bangsa Eropa memulai melaksanakan ekspedisi penjelajahan samudera yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Dari penjelajahan samudera itu mereka sampai ke Benua Afrika dan Asia hingga sampai ke Nusantara dengan niat berdagang. Namun, setelah mengetahui bahwa Bangsa Afrika dan Asia itu lemah kemudian munculah niat untuk melakukan Kolonialisme dan Imperialisme. Salah satu bangsa Eropa yang pertama kali sampai ke Nusantara adalah bangsa Portugis pada tahun 1512 dibawah pimpinan Fancisco Serrão berhasil mencapai Hitu (Ambon sebelah utara).³ Inilah awal dari masuknya bangsa Eropa di Nusantara. Setelah itu barulah disusul oleh bangsa-bangsa Eropa Lainnya.

Spanyol pertama kali mendarat di Nusantara tepatnya di Maluku (Tidore) pada tahun 1522 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano.⁴ Kemudian pada tahun 1596 bangsa Belanda yang di pimpin oleh Cornelis De Houtman tiba di pelabuhan Banten. Inilah awal kedatangan bangsa Belanda di Nusantara, namun kedatangan Belanda ini akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Pada tahun 1598 bangsa Belanda datang lagi ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck. Tiba di kepulauan Maluku pada bulan Maret 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Indonesia ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal.⁵

Semakin banyaknya para pedagang Belanda di Indonesia mengakibatkan antar sesama mereka terjadi persaingan. Selain itu mereka pun harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol dan Inggris. Atas kondisi tersebut, bukan keuntungan yang mereka peroleh, melainkan kerugian. Terlebih lagi dengan sering terjadinya

² Djakariah. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal.64

³ M.C. Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal.35

⁴ Wildan Herdiansyah. 2010. *VOC Negara Dalam Negara*. Bogor: PT. Regina Eka Utama. Hal.9

⁵ Adi Sudirman. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia* .Jogjakarta: Diva Press. Hal. 250

perampokan oleh bajak laut. Atas prakarsa dari pangeran Maurits dan Johan Van Olden Barnevelt, pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan *Verenigde Oost Indische Compagnie* – VOC (Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur). Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara Negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, Perancis, dan Belanda, untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pertama kali membuka kantor dagangnya di Banten pada tahun 1602 dan di kepalai oleh Francois Wittert.⁶

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di kepulauan Nusantara pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan perdagangan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan setara, antara pedagang dan pembeli. Namun, keadaan itu perlahan-lahan mulai berubah. Karena tingginya persaingan perdagangan antar Negara menyebabkan mereka untuk berusaha menguasai sumber-sumber rempah-rempah.

Sistem Politik Belanda dalam Penjajahan di Nusantara

1. VOC

VOC adalah singkatan dari *Verenigde Oost Indische Compagnie*. Sejarah lahirnya VOC dilatarbelakangi oleh datangnya bangsa Belanda di Nusantara. Mereka datang bukan mewakili kerajaan, tetapi merupakan kelompok-kelompok dagang. Kemudian kelompok-kelompok dagang itu berhimpun dalam suatu kongsi dagang bernama VOC. Ide untuk membentuk VOC ini dicetuskan oleh Jacob van Oldebarnevelt, seorang pemuka masyarakat Belanda yang sangat dihormati, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindari persaingan antar perusahaan Belanda (*intern*) serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya (*ekstern*).⁷ Awalnya VOC dibentuk sebagai kepentingan perdagangan, kemudian mulai melakukan monopoli perdagangan hingga pada akhirnya mulai menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah di Nusantara. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

2. Masa Peralihan

Setelah VOC jatuh bangkrut kemudian kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak 1 Januari 1800 secara resmi Nusantara berstatus sebagai wilayah kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda dan disebut sebagai Hindia-Belanda (*Nederlands-Indie*). Politik kolonial antara 1800-1870 bergerak dari sistem dagang menuju sistem pajak, sistem sewa tanah (*landelijk stelsel*). Daendels (1807-1811) dan Raffles (1811-1816) dengan didorong oleh idealisme mereka pada dasarnya mendukung cita-cita liberalisme untuk memberikan kebebasan perseorangan, milik tanah, kebebasan bercocok tanam, berdagang, kepastian hukum dan peradilan yang baik. Namun karena desakan negeri induk mereka tidak konsisten dan jatuh kembali kepada sistem yang konservatif dan

⁶ Wildan Herdiansyah. 2010. *Op.cit.* Hal.17

⁷ Adi Sudirman. 2014. *Op.cit.* Hal. 251

feodalistis yang didukung dengan administrasi pemerintahan yang sentralistis dan feodalistis.⁸

3. Sistem Tanam Paksa (1830-1870)

Motif utama pelaksanaan sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) oleh van den Bosch sejak 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat Perang Jawa: 1825-1830 di Indonesia dan Perang Belgia: 1830-1831 di Negeri Belanda, serta budget negeri Belanda sendiri yang dibebani oleh bunga yang berat, dan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan besar dari koloni-koloninya, terutama dengan pulau Jawa dengan jalan apapun.

Ciri utama sistem tanam paksa yang diintroduksi oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak *in natura*, yakni dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Dengan pajak *in natura* tersebut diharapkan oleh van den Bosch dapat terkumpul hasil-hasil tanaman perdagangan (ekspor) dalam jumlah yang besar, yang dapat dijual dan dikirim ke Eropa dan Amerika dengan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda.⁹ Ketentuan-ketentuan tersebut di atas kertas memang nampaknya tidak terlalu membebani rakyat, sekalipun secara prinsip juga berkeberatan. Namun dalam praktik ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering menyimpang jauh dari ketentuan, sehingga bukan saja merugikan penduduk, namun juga sangat memberatkan beban penduduk.¹⁰

4. Sistem Kolonial Liberal (1870-1900)

Politik kolonial liberal (1870-1900)¹¹ yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia-Belanda dengan diberikannya kesempatan bagi kaum modal swasta untuk membuka industri-industri perkebunan swasta juga tidak menjadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, pada akhir abad XIX tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia nampak semakin merosot. Sebabnya adalah jelas, ialah karena pemerintah Belanda tak mau melepaskan politik *batig saldo*-nya, bahkan ditingkatkan sebagai politik *drainage*. Keuntungan-keuntungan yang besar dari perkebunan-perkebunan tetap dialirkan ke Negeri Belanda dan tak sepeserpun yang ditinggalkan di Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat. Merkantilisme Negara digantikan dengan merkantilisme perusahaan besar yang kapitalistis, sehingga kehidupan ekonomi Hindia-Belanda tetap dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan Negeri Belanda, hanya sekarang bukan lagi oleh pemerintah Belanda, namun *batig slod*-nya juga tetap mengalir ke Negeri Belanda sistem dualisme di bidang ekonomi tetap dibiarkan, bahkan didukung pula dualism dalam administrasi pemerintah yang didasarkan pada sistem diskriminasi rasialisme.

⁸ Daliman. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Ombak Hal.123-124

⁹ *Ibid*, Hal.29 dan 32

¹⁰ *Ibid*, Hal.33-34

¹¹ *Ibid*, Hal.124-125

5. Sistem Politik Kolonial Etis (1900-1922)

Politik kolonial etis¹² sebagai politik kesejahteraan tetap tak membawa perbaikan bagi nasib rakyat Indonesia Politik balas budi dengan triloginya: irigasi, emigrasi (transmigrasi) dan edukasi ini lebih sebagai slogan daripada kenyataan. Kalau secara formal, pemerintah Hindia-Belanda terpaksa melaksanakannya, namun bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan dalam rangka melaksanakan kepentingan kolonialnya. Pembangunan sarana produktif seperti irigasi dan transportasi (jalan kereta api) bukan untuk kepentingan industri perkebunan, emigrasi (transmigrasi) ke luar Jawa lebih dimaksudkan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara, dan pendidikan diprogramkan bukan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat, melainkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai rendahan saja. Sekolah dan sistem kepegawaian pun bersikap diskriminatif. Sifat-sifat demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang ada dalam politik etis hanya sekedar legitimasi formal, yang substansinya tak punya makna implikatif yang nyata bagi perkembangan kehidupan rakyat Indonesia.

6. *Devide et Impera*

Devide et Impera adalah suatu upaya dari Belanda yang digunakan untuk menguasai sebuah wilayah dengan menggunakan adu domba dalam sebuah sistem kerajaan. Belanda menggunakan sistem ini sejak awal memasuki Indonesia, dari zaman VOC hingga Hindia Belanda. Berbeda jauh dari dulu, negara Belanda sekarang adalah negara yang sangat menjunjung tinggi adanya HAM. Politik adu domba pada abad 17 sangat digemari VOC untuk menguasai suatu daerah, dengan cara inilah Belanda yang bahkan jumlahnya jauh lebih sedikit dari pribumi bisa mengalahkannya.¹³

Politik pecah belah ini selalu menjadi langkah strategis Belanda untuk menghilangkan pemberontakan di berbagai daerah di bumi Nusantara. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Perlawanan Pattimura (1817), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1859-1863), Perang Bali (1846-1868), Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907), Perang Aceh (1873-1906).

Memang tidak semua taktik Belanda menggunakan cara *Devide et Impera* ini namun hampir seratus persen politik ini mampu menghancurkan atau setidaknya meredam pemberontakan untuk kemerdekaan daerah Nusantara yang dilakukan tokoh-tokoh yang kini kita kenal sebagai Pahlawan Nasional.¹⁴

Latar Belakang Pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda

Munculnya pemikiran bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda adalah pada tahun 1936, Gubernur Jenderal B.C. de Jonge berkata, "Kami Orang Belanda sudah berada disini 300 tahun dan kami akan tinggal disini 300 tahun lagi"

¹² *Ibid*, Hal 125-126

¹³ <http://www.idsejarah.net/2016/03/bagaimana-politik-adu-domba-atau-devide.html?m=1> diakses pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 10.47 WIB

¹⁴ <http://www.kompasiana.com/jejak-devide-et-impera.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 10.47 WIB

suatu ucapan yang seakan-akan menantang kaum pergerakan kebangsaan pada waktu itu. Akan tetapi, kini telah terbukti, ucapan tersebut terlalu gegabah, karena perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil mencegah bahwa Belanda “tinggal disini 300 tahun lagi”.¹⁵

Selain itu, ternyata terdapat pula di dalam pidato Presiden Soekarno sebelum Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, salah satu isinya adalah “Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya..”¹⁶ sebenarnya pidato ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia.

Kemudian tokoh Indonesia selanjutnya adalah Muhammad Yamin. Asvi Warman Adam dalam buku *Seabad Kontroversi Sejarah* menulis bahwa salah satu orang yang banyak menciptakan “sejarah yang bercorak nasional” alias propaganda adalah Muhammad Yamin. Dalam penulisan sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yamin, berdasarkan pemikiran Yamin yang menginginkan penulisan sejarah yang bersifat nasionalis dan anti kolonial. Namun karena keadaan zaman pada waktu itu Yamin terlalu menekankan semangat nasionalis sehingga agak melebar dari penulisan historiografi Indonesiasentris yang sesungguhnya. Justru penulisan historiografi Indonesiasentris yang Yamin maksud terjebak dalam historiografi Eropasentris. Salah satunya adalah tentang penjajahan 350 tahun.

Buku-buku sejarah yang ada di Indonesia selama ini memaparkan berbagai interpretasi sejarawan yang berbeda dalam upaya mereka merekonstruksi dan menjelaskan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia, sedangkan masyarakat juga memiliki pemahaman sendiri tentang sejarah yang sama. Di dalam sistem pengetahuan masyarakat Indonesia tentang masa lalu, mereka percaya bahwa bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama tiga ratus lima puluh tahun sebelum tentara Jepang mengambil alih kekuasaan pada saat Perang Dunia II dan aktivis pergerakan kebangsaan Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tulisan-tulisan sejarah yang ditulis oleh orang Indonesia baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia II. Secara jelas menunjukkan cara berpikir diatas. Seperti yang ditulis oleh salah seorang sejarawan terkemuka Indonesia di awal kemerdekaan R. Moh. Ali dalam bukunya *Perjuangan Feodal*, “kedatangan Cornelis Houtman sebagai pelopor penjajahan Belanda, penjajahan dalam arti yang sebenarnya yaitu memeras untung yang sebanyak-banyaknya”. Oleh karena itu tidak heran jika sampai saat ini pun masih banyak orang di Indonesia beranggapan bahwa penjajahan tiga setengah abad itu sebagai sebuah kenyataan. Padahal dalam prespektif sejarah objektif, anggapan itu tidak lebih dari sebuah mitos, dan bahkan sampai tingkat tertentu pendapat ini telah berubah menjadi ideologi pembodohan yang seolah-olah harus diterima sebagai kebenaran oleh bangsa Indonesia.¹⁷

¹⁵ A.B.Lapian (Dalam Kata Pengantar) G.J.Resink. 2013. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok: Komunitas Bambu Hal.xxi

¹⁶ Adi Sudirman. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: Diva Press. Hal. 305

¹⁷ *Ibid*, Hal.132-133

Kebenaran 350 Tahun Indonesia dijajah Belanda

Prof. G.J. Resink membantah pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, yang menyebut bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda adalah mitos. Karena mitos itu sendiri mengandung arti suatu cerita yang dilebih-lebihkan, sehingga Resink berpendapat bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda merupakan suatu cerita yang dilebih-lebihkan dan tidak jelas kurun waktu kapan mulai sampai berakhirnya penjajahan tersebut.

Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya, tidak hanya melalui pendekatan politik akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Melalui pendekatan hukum, Resink menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Bangsa Indonesia (dulunya disebut Nusantara), tidak semuanya dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa fakta-fakta yang diungkapkan (penulis merujuk dari G.J. Resink) adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan Nama Indonesia

Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, kalau dihitung mundur dari tahun 1945, artinya kita dijajah Belanda mulai 1595. Sedangkan tahun 1596 Cornelis de Houtman baru pertama kali mendarat di Banten dan dalam catatan sejarah de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Artinya pada tahun 1595 belum ada seorang pun dari bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Saat Cornelis de Houtman mendarat di Banten itu tujuannya untuk berdagang, sekalipun de Houtman melakukan penjajahan bukan semata-mata berdagang di tahun 1596 tentu saja yang dijajah bukan Indonesia. Karena nama Indonesia itu sendiri belum pernah ditulis orang pada tahun 1596.

Sebutan "Indonesia" sendiri baru dibuat 254 tahun sesudah de Houtman menginjakkan kakinya di Indonesia. Nama Indonesia pertama kali dipakai pada tahun 1850. Nama Indonesia berasal dari perkataan "*Indo*" dan "*Nesie*" (dari bahasa Yunani: *Nesos*) berarti kepulauan Hindia. Adapun kata "*nesos*" itu hampir berdekatan dengan kata "*nusa*" dalam bahasa Indonesia, yang juga berarti pulau. Orang pertama yang mempergunakan nama Indonesia itu ialah James Richardson Logan (1869) dalam kumpulan karangannya yang berjudul *The Indian Archipelago and Eastern Asia*, terbit dalam *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (1847-1859).¹⁸

Nama Indonesia tidak dikenal pada masa sebelum dipopulerkan oleh peneliti tersebut. Yang paling dikenal hanyalah Nusantara, meliputi Negara Indonesia dan beberapa negara yang bertetangga dengan Indonesia sekarang, seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Nusantara masa lalu dengan Negara Indonesia masa sekarang sangatlah berbeda. Mengapa demikian, karena Nusantara pada masa dahulu adalah suatu kompleks atau wilayah dimana negeri-negeri/kerajaan-kerajaan yang berdaulat dan merdeka di dalamnya serta memiliki kedaulatan atas kerajaannya masing-masing. Contohnya sebelum masuknya Islam yaitu Majapahit, Padjajaran, Dharmasraya, dan kerajaan di Semenanjung Malaya. Setelah masuknya Islam di Nusantara ada juga Kesultanan Aceh, Kerajaan Bone, Kesultanan Banten, Mataram dan Negara-negara yang

¹⁸ Solichin Salam. 1984. *Bung Karno Putera Fajar*. Jakarta: PT Gunung Agung. Hal.1

merdeka lainnya. Tidak ada yang namanya Negara Kesatuan Nusantara, yang ada hanyalah hubungan internasional antar Negara/Kerajaan, terutama dalam hal perdagangan. Nusantara adalah suatu sebutan wilayah tetapi sifatnya tidak mengikat, antara daerah satu dengan yang lain itu tidak ada ikatan.

Jika suatu wilayah/negara di Nusantara ditakhlukkan oleh penjajah (Belanda), maka Negara di bagian Nusantara yang lain belum tentu terjajah atau masih merdeka. Seperti contoh ketika Belanda menakhlukkan sebagian besar wilayah di Jawa, sementara itu wilayah bagian Nusantara yang lain seperti Kerajaan Makasar masih berdaulat, begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan dan di Pulau Sumatera.

Sedangkan wilayah Indonesia, luas wilayahnya adalah bekas wilayah Hindia Belanda, Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditinjau dari sifatnya Indonesia adalah suatu Negara yang mengikat dan secara konstitusi Indonesia telah memenuhi 4 syarat berdirinya Negara. Mulai dari ujung Sumatera sampai Papua diikat dengan suatu ikatan persatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, jika Indonesia terjajah berarti wilayah dari Sabang sampai Merauke tersebut dikuasai oleh bangsa asing, beda dengan Nusantara yang telah disebutkan diatas tadi. Makanya ada sebutan "Perjuangan Nasional", namun jika di Nusantara ada sebutan "Perjuangan Daerah".

2. Hukum bangsa-bangsa di Makassar masa lalu

Di daerah Makassar khususnya, ada sebuah Perjanjian Bongaya yang dilakukan tahun 1667 dan diperbarui di Ujung Pandang pada tahun 1824.¹⁹ Dalam Perjanjian Bongaya wilayah antara kekuasaan Kolonial dan wilayah Makassar telah diatur dan dibagi sesuai dengan perjanjian, artinya dalam hal ini Belanda tidak mempunyai wewenang atau mencampuri wilayah diluar wilayahnya.

Pengakuan terhadap kewenangan maritim Makassar dalam konteks perairan teritorial pada umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian tahun 1637 dengan VOC. Semua pihak penandatanganan Belanda menjanjikan bahwa tempat berlabuh Makassar akan dibiarkan tidak dilanggar, dalam konteks bahwa Belanda disana tidak akan menyerang siapapun musuhnya dan juga menikmati kebebasan yang setara.²⁰ Tampak terlihat dalam kalimat tersebut bahwa Pelabuhan Makassar masih dalam konteks yang siapa saja bisa datang dan pergi untuk berlabuh, berdagang tanpa ada batasan-batasan. Berarti di Makassar masih berlakunya perdagangan bebas.

Dalam hukum internasional Indonesia, Sabannara Makassar merupakan pejabat untuk urusan pelayaran dan perdagangan, dan karenanya sebagai pejabat administratif, dia juga memiliki kewenangan mengatur yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan yang dilakukan dengan para pedagang Melayu, minimal pada awal abad ke-17. Namun hingga tahun 1669, Syahbandar Makassar masih merupakan salah satu tokoh terkemuka yang menandatangani perjanjian dengan VOC pada Juli 1699 tersebut. Selain itu dapat disimpulkan dalam kitab hukum pelayaran dan perniagaan *Amana Gappa* bahwa sabannara', bersama to'matowa, dipandang diluar negeri sebagai penengah atas perselisihan-perselisihan yang mungkin muncul di atas kapal antara pedagang dengan awak kapal.

¹⁹ ITR, xxxv (1880) Hal.57-58 dikutip oleh G.J. Resink, (2013:72).

²⁰ G.J Resink. 2013. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok: Komunitas Bambu. Hal.35

Syahbandar sebagai pejabat hukum Indonesia khas yang mendapatkan kekuasaan administratif serta kewenangan pengaturan dan hukum dalam konteks hukum internasional.²¹ Disini nampak bahwa salah satu jabatan masyarakat Makassar memiliki keistimewaan dalam sebuah jabatan. Karena adanya fakta bahwa salah satu masyarakat Makassar yang memiliki hak istimewa ketika masa VOC. Maka sudah jelas bahwa Makassar saja tidak dijajah.

3. Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Nusantara (1850-1910)

Pada Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Regeeringsreglement*), pasal 44 tahun 1854, tercantum pernyataan tertinggi dari penyusun undang-undang dalam tata Negara penjajahan, yakni raja dan parlemen. Pasal itu memaparkan dengan jelas bahwa daerah yang kini disebut swapraja, pada paruh kedua abad ke-19, dipandang sebagai kerajaan luar negeri yang merdeka di dalam lingkungan Hindia Belanda (sebutan bagi Nusantara/Indonesia secara geografis) namun sebelum adanya Hindia Belanda.

Berkaitan dengan hal itu dalam pasal 25 tahun 1836, Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia berwenang mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, dalam pasal 44 tahun 1854, gubernur jendral berdasarkan perintah raja berwenang menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan perjanjian lain dengan raja-raja dan bangsa-bangsa di Hindia.

Parlemen Belanda mengadakan perundingan-perundingan mengenai pasal tersebut dan menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, menteri jajahan saat itu menyatakan di dalam atau berdekatan dengan Hindia Belanda terdapat "raja-raja Hindia merdeka". Meskipun mereka berjumlah sangat sedikit. Ditambah lagi, mereka sudah sejak lama melakukan perjanjian-perjanjian internasional yang mungkin dapat diatur dalam istilah-istilah pasal ini. *Kedua*, ternyata pasal tersebut tidak mengenai raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia yang termasuk jajahan Inggris, Spanyol atau Portugis. Hal ini Belanda menganggap bahwa menyerang raja-raja adalah perbuatan tidak hati-hati, suatu hal yang tidak bisa diprediksi dari seorang gubernur jendral.

Kemudian pada tahun 1870-an muncul harapan untuk mengadakan perjanjian dengan Aceh yang secara geografis termasuk Hindia Belanda tetapi menurut hukum antar bangsa tidak. Istilah perjanjian pun masih belum diganti seluruhnya dengan kata kontrak. Hal ini menambah kejelasan bahwa sampai pada saat penyerahan kedaulatan, pasal 34 dari Peraturan Dasar Ketatanegaraan Hindia masih tetap menyebut "perjanjian dengan raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia" yang diadakan gubernur jenderal.²²

Orang Belanda antara 1870 dan 1910 melihat adanya kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka di Sumba, banyak Negara-negara merdeka di Sulawesi Selatan, sebuah Negara Aceh merdeka, negara Langkat yang mungkin netral, negara Lingga yang dipandang sebagai Negara asing dan luar negeri, daerah-daerah Batak yang merdeka menurut (atlas) buku peta bumi karangan Bos dari 1899, keterangan menyolok ini saya peroleh dari surat menyurat dengan *van Asbeck*-yang menurut "Riwayat Pantai Timur Sumatera" (*Kroniek van Sumatra's Oostkust*) dalam 1916 merupakan "bagian wilayah merdeka yang terakhir di Sumatera" terdiri

²¹ *Ibid*, Hal.41

²² *Ibid*, Hal: 64-65.

dari: "daerah-daerah swapraja Kerajaan na Sembilan, Kerajaan na Sepuluh, dua kompleks kampung Batak di batas udik Bila" dan baru pada 1915 dimasukkan kawasan ke dalam Gubernemen Pantai Sumatera Timur dengan penaklukan kepada Sultan Bila.

Orang-orang Belanda tadi melihat selanjutnya kenasionalan Ternate, Bacan, Kutai dan Riau serta berbagai-bagai kerajaan dan Negara-negara lain. Pandangan orang Belanda mengenai hal ini didasarkan pada hukum dan disesuaikan dengan berbagai corak hukum antar bangsa, sebagaimana mereka melihat persoalan perkawinan dan konsesi pertambangan menurut hukum perdata internasional, penyelundupan senjata internasional dan perniagaan budak belian internasional. Juga sungai-sungai perbatasan internasional dan pendobrak-pendobrak blokade internasional dengan nama-nama dari Cina, Inggris serta Indonesia.²³

Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa orang Belanda diantara tahun 1870 dan 1910 melihat adanya kerajaan/ Negara yang merdeka atau dianggap asing/luar negeri yang termasuk di dalamnya adalah Aceh. Dalam catatan sejarah, perang Aceh melawan Hindia Belanda terjadi antara tahun 1873 sampai 1912. Asal mula terjadinya perang Aceh karena peristiwa yang terjadi tahun 1871, yaitu penanda tanganan traktat Sumatera antar Kerajaan Inggris dan Belanda. Dalam traktat itu dinyatakan bahwa Belanda tidak berkewajiban lagi untuk menghormati kedaulatan dan integritas Kerajaan Aceh yang tidak ada ikatan bagi Belanda untuk memperluas kekuasaannya di seluruh pulau Sumatera.²⁴ Artinya Belanda bebas melakukan perluasan terhadap seluruh wilayah di Sumatera tanpa ada peraturan yang mengikat. Hal ini membuat Kerajaan Aceh terancam sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, karena situasi tersebut Aceh berusaha meminta bantuan dari Negara-negara yang dianggap bersahabat dengannya. Namun usaha tersebut gagal dan pada akhirnya Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh pada tahun 1873 dan berlangsung hingga tahun 1904.

Artinya, terjadinya perang Aceh di mulai tahun 1873 dan berakhirnya perang Aceh yang ditandai dengan Sultan Aceh terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya mengakui bahwa Aceh merupakan wilayah Hindia Belanda pada tahun 1904. Meskipun demikian Belanda tetap tidak mampu menguasai Aceh seutuhnya dikarenakan perlawanan dari rakyat Aceh masih terus berlangsung melalui perang gerilya hingga tahun 1912. Pada tahun 1912 Belanda baru sepenuhnya berkuasa atas Aceh. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Aceh sebelum tahun 1912 masih merdeka. Dengan begitu Aceh maksimal dijajah Belanda selama 38 tahun.

Pada tahun 1895, Mahkamah Agung masih melihat adanya "Negara-negara kecil yang merdeka" di pulau Sumba. Selain itu dalam atlas Hindia Belanda resmi yang diterbitkan atas perintah Kementrian Jajahan. Kementrian memperlihatkan pada lembaran raksasa atlas Sumatera Tengah "negeri-negeri merdeka" di sebelah utara dan timur wilayah Pemerintahan Sumatera Barat (halaman 7). Selanjutnya "negeri-negeri Kerinci merdeka" dan "negeri-negeri merdeka lainnya", termasuk dalamnya "Dalu-Dalu" dan "Rokan" (halamn 9). Sedangkan pada halaman ketiga (halaman 10) terdapat "negeri-negeri Batak merdeka" di samping Sumatera Timur

²³ G.J. Resink. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hal.28

²⁴ Sartono Kartodirdjo. 1973. *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI. Hal: 239.

dan Tapanuli. Karena atlas ini disusun di Biro Topografi di Batavia pada tahun-tahun 1897-1904 dan dicetak pada tahun 1898-1907 pada Lembaga Topografi di Den Haag.²⁵

Raja-raja merdeka yang disebutkan tadi telah memperoleh pengakuan pada 1854 oleh Menteri Jajahan dalam Balai Rendah meskipun jumlah mereka amat sedikit. Salah satu anggota Parlemen, van Nispen van Savenaer, ternyata tidak percaya dengan keakuratan kata “amat”, karena beliau kemudian bertutur: “tuan menteri mengatakan bahwa masih ada sedikit raja merdeka di Hindia..”, lalu ia menambahkan: ”tetapi, tetapi kata-kata tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa raja merdeka. Dan raja-raja merdeka itu adalah sebenarnya kekuasaan-kekuasaan asing..”²⁶

Dari beberapa bukti-bukti yang telah dipaparkan diatas, secara otomatis pernyataan yang menunjukkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun akan runtuh dengan sendirinya.

Jika Resink mengatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun adalah sebuah mitos, namun bagi sejarawan Asvi Warman Adam pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda merupakan sebuah manipulasi sejarah dalam bukunya *Membongkar Manipulasi Sejarah*. Jadi, maupun dikatakan mitos atau manipulasi sejarah, yang jelas pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda tidak ada fakta/kebenarannya. Pada intinya, para ahli sejarah sudah sepakat bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda itu bukan merupakan fakta sejarah.

Selanjutnya beberapa tokoh sejarawan seperti Taufik Abdullah juga setuju bahwa penjajahan 350 tahun oleh Belanda di Indonesia itu hanyalah sebuah mitos. Kemudian Bambang Purwanto dalam bukunya *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, A.B.Lapian dalam kata pengantar buku *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Mestika Zed dalam bukunya *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*, kemudian ada Joss Wibisono yang pernyataannya diterbitkan pada kolom *majalah Historia.id*.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Banyak hal yang perlu kita pahami dan renungkan bahwa masih banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia yang memiliki hukum tersendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Selama ini apa yang kita pahami adalah sebuah mitos belaka karena tidak ada bukti nyata bahwa kita dijajah 350 tahun. Hitungan Resink, Belanda sebenarnya hanya menjajah seluruh Nusantara selama 40 sampai 50 tahun. Inipun masih menghitung perbedaan waktu di masing-masing daerah. Wilayah di Jawa menjadi daerah yang paling lama dijajah.

Namun dari beberapa literatur yang penulis peroleh, penulis mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia dijajah Belanda hanya 30 tahun. Setelah pemimpin-pemimpin rakyat Aceh sampai tahun 1912 telah disingkirkan oleh Belanda

²⁵ G.J. Resink. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hal.76

²⁶ Keuchenius, handelingen, jil. III, hal.372. dikutip oleh G.J. Resink, (2013:116).

yang menyebabkan tidak ada lagi panutan bagi rakyat Aceh. Sehingga sejak 1912 seluruh wilayah di Indonesia resmi dijajah Belanda hingga tahun 1942.

Pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda yang dibuat oleh para politisi Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai positif dengan tujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia, serta legitimasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena kondisi pada waktu itu bangsa Indonesia terpecah-pecah dan mengembalikan semangat juang bangsa Indonesia. Namun meskipun demikian, pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda berdampak pada penulisan sejarah Indonesia, karena pemahaman ini bukan fakta sejarah.

Rekomendasi

1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia harus selektif dan pandai menganalisis kembali dalam membaca sejarah Indonesia. Kita harus mengoreksi dan mensosialisasikan bahwa bangsa dan Negara Indonesia tidak pernah dijajah oleh Negara mana pun apalagi oleh Belanda selama 350 tahun. Karena yang mereka kuasai adalah kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di wilayah Indonesia sekarang. Itu pun, tak boleh digeneralisasi secara kolektif 350 tahun. Sebab kerajaan-kerajaan tersebut tidak ditundukkan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi secara berturut-turut selama dalam waktu kurang lebih 300 tahun.
2. Kepada para sejarawan dan pemerintah untuk merenungkan kembali dan selanjutnya menggagas kembali tentang bagaimana sebaiknya penulisan sejarah Indonesia secara berkelanjutan dapat disempurnakan. Memetik pengalaman dari dinamika penulisan sejarah Indonesia dari tahun 1957 hingga 1970-an, kiranya masih perlu adanya pengembangan dan wawasan kajian sejarah yang lebih luas, tajam, kaya, dan menyeluruh agar mampu menjelaskan sejarah Indonesia yang lebih lengkap dan jelas. Sehingga tidak terjebak kedalam historiografi Eropasentris.
3. Kepada seluruh pelajar ataupun mahasiswa harus lebih kritis lagi dalam mempelajari sejarah Indonesia. Diharapkan tidak menerima begitu saja apa yang telah diketahui dari sejarah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Daliman. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta: Ombak

Djakariah. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah/Louis Gottschalk; penerjemah Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Herdiansyah, Wildan. 2010. *VOC Negara Dalam Negara*. Bogor: PT. Regina Eka Utama.

Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.

Resink, G.J. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

_____. 2013. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok: Komunitas Bambu.

Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Salam, Solichin . 1984. *Bung Karno Putera Fajar*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia* .Jogjakarta: Diva Press.

Sumber Internet

<http://www.idsejarah.net/2016/03/bagaimana-politik-adu-domba-atau-devide.html?m=1> diakses pada tanggal 05 Agustus 2016 pukul 10.47 WIB

<http://www.kompasiana.com/jejak-devide-et-impera.html> diakses pada tanggal 05 Agustus 2016 pukul 10.47 WIB